

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM
PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN

NIM : 1 0 7 2 7 0 0 0 2 1 5

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, **Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006**. Undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem suatu peradilan, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka atas perkara yang dilakukan.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jalan Teratai No. 85 Sukajadi Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di pengadilan Negeri Pekanbaru, bagaimana pula faktor yang menyebabkan perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap perlindungan saksi kejahatan yang ada di dalam permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut.

Populasi penelitian ini adalah saksi kejahatan yang dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang betul-betul dapat bertindak sebagai saksi yang berjumlah 3.880 orang saksi kejahatan dari 970 perkara kejahatan pidana yang terdapat pada tahun 2010. Dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu sebanyak 968 orang saksi kejahatan dengan jumlah 242 perkara pidana di tahun 2010. Dikarenakan jumlah populasi sangat besar, penulis mengambil sampel sebanyak 3% atau 30 orang dari jumlah populasi yang ada. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian untuk melihat perlindungan terhadap saksi kejahatan tersebut, ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa diskriptif kualitatif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deskriptif, induktif dan deduktif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *random sampling* yaitu mencari data kepada responden dengan secara acak dalam populasi.

Adapun hasil dari penelitian ini, melihat dari perlindungan yang telah diberikan terhadap saksi kejahatan masih rendah, terbukti dari hasil pilihan responden atau saksi yang merasa dirinya takut untuk memberikan kesaksian dan tidak merasa memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum sebelum dan setelah memberikan kesaksiannya berjumlah 40%, dan yang merasa mendapatkan tekanan/intimidasi dari pihak lain berjumlah 50%, dan ketika di pengadilan sewaktu proses pemeriksaan saksi masih ada yang tidak memperoleh perlindungan sebanyak 10%. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan pengayoman terhadap saksi dari aparat penegak hukum, sehingga saksi jarang mendapatkan perlindungan secara efektif. Selain dari itu, tidak adanya pengimplementasian atau penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara efektif dan optimal terhadap saksi kejahatan, sehingga saksi merasa takut dan tidak berkenan untuk dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vii
Kata Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI	
PEKANBARU.....	16
A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru... ..	16
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	19
C. Wewenang Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	26
D. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	31
BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN	
SAKSI KEJAHATAN.....	32
A. Perlindungan saksi kejahatan dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia.....	32
B. Pengertian Saksi dan Kejahatan	38
1. Pengertian Saksi.....	38

2. Pengerian Kejahatan.....	42
C. Syarat-Syarat Saksi	44
D. Jenis - Jenis Saksi.....	50
1. Saksi a Charge dan Saksi a De Charge.....	50
2. Saksi Vurbalisan.....	54
3. Saksi Mahkota (<i>kroon gtuige</i>).....	55
D. Kegunaan Saksi	56
1. Harus Mengucapkan Sumpah Atau Janji.....	57
2. Memberikan Keterangan Guna Kepentingan Pemeriksaan.....	58

BAB IV : PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN DITINJAU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006.....	65
A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	65
B. Perlindungan Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	78
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Saksi Kejahatan.....	89
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*reachtaath*) yang identik dengan peraturan perundang-undangan dengan bentuk tertulis, yang akan dijadikan dasar hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa memandang suku, agama, ras dan latar belakang budaya.

Usaha penegakan hukum pidana ditengah air acap kali terganjal oleh susahny memperoleh alat bukti dalam proses peradilan pidana berupa keterangan saksi dan korban. Para saksi dan korban kerap kali mengalami intimidasi, ancaman, tekanan dari pihak pelaku atau pihak tertentu yang tak ingin kejahatan terbongkar. Akibatnya, para saksi dan korban tidak bisa secara leluasa menyampaikan informasi yang sebentar tentang kejadian yang mereka dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana¹. Keberadaaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), Cet ke-2, h.5.

banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dan lain sebagainya dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan dapat terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu².

Mengenai perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia³.

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (UU RI No.13 Tahun 2006), (Sinar Grafika 2006), Cet ke-1, h. 18

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: PT.Rajawali Pres, 2007), Cet ke-2, h. 57.

Sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban namun dikhususkan untuk tindak pidana tertentu sehingga belum dapat menampung perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semakin beragam dan kompleks pada jaman sekarang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Akhirnya pada Tanggal 18 Juli 2006, DPR mensahkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang mengamanahkan pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban. Adapun peraturan sebelumnya masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁴

Namun perbuatan kejahatan yang dilakukan setiap oknum kepada para korban kejahatan merupakan tindakan yang sudah diatur secara jelas di dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Baik itu di dalam KUHP, Undang-Undang No.13 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apalagi yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan sudah betul-betul diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan tersebut.

Setelah kita lihat sekian lama banyak para pihak yang menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dapat

⁴ Redaksi Sinar Grafika, *op.cit.*, h.v.

diberlakukan. Berlakunya undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan saksi dan korban kejahatan⁵.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban kejahatan untuk disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain yang menyebutkan, penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. padahal kita ketahui bahwa peran saksi korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku⁶.

Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindak teror dan ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi korban kejahatan sangat memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat (1) KUHP,

⁵ *Ibid.* h. V

⁶ *Ibid.* h. 19

keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Pada saat saksi kejahatan akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelumnya, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian, jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal (1) butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). yaitu, “*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”⁸.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian saksi dalam hal ini dapat dilihat pada pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁷ Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta Selatan: Visimedia 2010), Cet. ke-1, h. 87.

⁸Solehuddin, (Penghimpun), *Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Acara Pidana, dan Acara Perdata* (KUHP, KUHAP, dan KUHPrdt), (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet ke-1, h. 149.

Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Pekanbaru perlindungan saksi kejahatan yang ingin diminta penjelasannya dalam proses pemeriksaan di persidangan memang betul-betul dapat dihadirkan untuk dapat memberikan kesaksian dengan apa yang ia dengar, lihat, alami dan ketahui dari peristiwa pidana tersebut. Sesuai dengan dilakukannya penelitian awal dengan bentuk observasi pada hari selasa, tanggal 12 Oktober 2010 tepat pada pukul 13.00 WIB. Bahwasanya banyak fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya masalah kasus pidana yang ingin di selesaikan seperti kasus penganiayaan dengan Reg No: 678/PID.B/2010/PN.PBR, atas nama terdakwa, Ilham Sardi ALS Bin Amsar, adapun Hakim Ketua Majelis yaitu: Lilin Herlina. SH, Hakim Anggota, Pandu Budiono, SH.MH dan Sarah Louis,S, SH.M.Hum, Panitera Pengganti Masri, SH, Jaksa Penuntut Umum, Ivan Hebron, S, SH, dengan dihadiri saksi ketika itu Rosniali dan saksi lainnya.⁹

Dalam hal ini keberadaan saksi kejahatan di dalam proses persidangan harus dapat dihadirkan guna untuk dapat memberikan keterangan di depan majlis hakim, namun sebelum saksi tersebut memberikan keterangan yang ingin ia sampaikan terlebih dahulu saksi ketika itu disumpah dengan menurut keyakinannya, agar dapat menyampaikan keterangan yang jelas, jujur dan transparan dengan apa yang ia ketahui, setelah itu saksi ditanya oleh majlis hakim apakah saksi tersebut dalam keadaan sehat.¹⁰

⁹ Sumber Data: Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tahun 2010

¹⁰Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Observasi*, tanggal 12 Oktober 2010

Pemeriksaan saksi dilakukan dengan memanggil saksi kepersidangan seorang demi seorang. Setelah saksi berada dihadapan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi identitasnya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaan, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan korban kejahatan, serta apakah kenal dengan terdakwa (korban kejahatan) tersebut.

Sebelum memberikan keterangan di persidangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan.¹¹ Sedangkan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan tidak dilakukan di bawah sumpah, lain halnya pemeriksaan saksi di sidang pengadilan keterangan saksi diucapkan harus di bawah sumpah atau janji. Sumpah atau janji yang diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan disebut sumpah promisoris, sedangkan sumpah atau janji yang diucapkan setelah didengar keterangannya sebagai saksi di sidang pengadilan disebut sumpah assesoris¹².

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri saksi tetap dalam posisi dilindungi dan merasa aman tidak ada mendapatkan tekanan ataupun intimidasi dari pihak manapun, namun setelah pemeriksaan selesai di Pengadilan Negeri saksi tidak lagi mendapat perlindungan dari aparat penegak

¹¹Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Cet ke-2, h. 73.

¹²Ali Yuswandi, *penuntutan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*, (Jakarta: CV Pedomani Ilmu Jaya 1995), Cet ke-1, h. 51-52.

hukum yang mengakibatkan saksi kejahatan bisa saja akan mendapat tekanan dan ancaman bahkan teror dari pihak lain.

Sedangkan dalam konteks undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1), mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh pengantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan penasehat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir¹³.

Dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)¹⁴. Penjelasan dari pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/ psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Jelaslah, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang diamanatkan dan dinyatakan dalam undang-undang ini.

Sesuai dengan paparan diatas, maka ada baiknya penulis akan mengeksplor dan melihat dengan dekat kondisi di lapangan dan juga memaparkan sejauh mana peranan, guna, dan fungsi serta perlindungan saksi kejahatan terhadap tahap proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan menjadi penentu dalam mencari kebenaran dan keadilan di Pengadilan-

¹³Redaksi Sinar Grafika, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (UU RI No. 13 Thn. 2006) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet 1, h. 3-4.

¹⁴*Ibid.*, h. 4

Pengadilan Negeri yang berada didaerah Riau pada umumnya, dan Pekanbaru pada khususnya.

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah tersebut yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Ditinjau Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)”*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada: *“Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berketepatan pada bulan oktober sampai bulan desember tahun 2010, selanjutnya akan ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban)”*

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
- b. Apa faktor yang menyebabkan perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap perlindungan Saksi kejahatan tersebut ?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c. Untuk dapat mengetahui bagaimanapun tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan.

2. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Ketatanegaraan., dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual tentang pemikiran hukum yang ada kaitannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi penulis sendiri khususnya, disamping itu juga sebagai upaya untuk mengetahui khazanah ilmu perundang-undangan dan sebagai sumbangsih dalam khajanan ilmiah guna pengembnagan ilmu pengetahuan.

- c. Penelitian ini juga sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dalam konsentrasi Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No. 85 Sukajadi Pekanbaru, Provinsi Riau 28127, Telp: (0761) 22573, 23610, website: <http://www.pn-pekanbaru.go.id>. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang perlindungan seorang saksi dalam memberikan kesaksiannya dalam proses pemeriksaan di pengadilan pada waktu berjalannya persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga perlu diangkat keberadaan dan kebenarannya melalui penelitian ini. Disamping itu pula Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan tempat yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak dalam mencari hakikat yang sebenarnya.

2. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang betul-betul sudah dapat dihadirkan sebagai saksi dalam proses persidangan di pengadilan,

sedangkan objeknya adalah perlindungan terhadap saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah saksi-saksi tindak pidana kejahatan yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dapat dihadirkan dipersidangan dalam proses pemeriksaan yang berjumlah 3.880 saksi dari 970 perkara kejahatan pidana yang terdapat di dalam KUHP pada tahun 2010. Sedangkan pada bulan 10 sampai bulan 12 itu ada 242 perkara kejahatan. Maka setiap 1 perkara kejahatan pidana memiliki 4 orang saksi yang akan di hadirkan dalam proses pemeriksaan di persidangan¹⁵. Jadi jumlah saksi kejahatan pidana pada bulan 10 sampai 12 sebanyak 968 saksi. karena jumlah populasinya cukup besar, maka penulis sebagai peneliti mengambil sampel sebanyak 3% yaitu 30 orang saksi dengan menggunakan *random sampling* yaitu mencari data kepada responden dengan secara acak.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung diambil dari saksi kejahatan yang berada di pengadilan negeri pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini dan juga kepada dewan Hakim, Jaksa, Pengacara, Panitera

¹⁵Hj. Dessurya, (Ketua PAN MUD Hukum), wawancara, Pengadilan Negeri Pekanbaru, 1 Nopember 2010

Pengadilan ataupun para pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara :

- a. Wawancara, wawancara dilakukan dengan responden yang berpedoman kepada daftar wawancara yang telah penulis susun sebelumnya.
- b. Observasi, observasi dilakukan untuk mengamati setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Angket, penulis menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah tersedia pada setiap pertanyaan dalam angket yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- d. Studi dokumen, penulis mengumpulkan data-data dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri setempat.

6. Metode Analisa data

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Deskriptif Kualitatif. Yaitu, menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara suatu data dengan data yang lainnya. Sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. *Deskriptif*, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap penelitian.
- b. *Deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum.
- c. *Induktif*, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab. Setiap bab terdiri beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Memuat tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berisikan sekilas tentang sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru, susunan kepengurusan organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, wewenang nya, visi dan misi Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- Bab III : Merupakan uraian tentang saksi kejahatan, yang terdiri dari pengertian, syarat-syaratnya, yang berhak menjadi saksi, dan kegunaannya.

Bab IV : Perlindungan saksi korban kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru diuraikan secara jelas, serta faktor yang menyebabkan perlindungan bagi saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Bab V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN

NEGERI PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pembentukan kota madya Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi tingkat I Riau sebelumnya telah melalui sejarah yang sangat panjang. Proses bermulanya dari sebuah dusun kecil yang terletak di pinggir Sungai Siak yang disebut Payung Sekaki. Dusun ini di buka oleh suku Senapelan, sehingga disebut dengan Senapelan.

Kemudian di zaman Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Syah (yang wafat tahun (1791), dusun Senapelan ini mengalami era baru dalam perkembangannya, Senapelan menjadi bagian dari Kerajaan Siak, sehingga menimbulkan gagasan untuk membuat pakan (sejenis pasar) yang berasal dari bahasa daerah minang, kemudian Pakan baru itu diperbaiki menurut bahasa Indonesia sehingga menjadi Pekanbaru, jadi Huruf A atau huruf kedua dirubah menjadi huruf E¹.

Dengan wafatnya Sultan Abdul Jalil Almuddin Syah, usaha raja muda itu untuk membangun kembali pekan di Senapelan tidaklah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Tetapi berkat kegigihannya, Pekan tersebut dapat

¹Direktorat Jendral Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, *Dokumentasi Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri*, (Jakarta: 1922), h.33

juga didirikan kembali namun tidak di tempat semula, melainkan di tempat yang baru, yaitu di sekitar pelabuhan yang ada sekarang².

Menurut almarhum Sunil, pekan yang baru dibangun pada tahun 1204 H. Tanggal 12 Rajab hari Selasa dan bertepatan pada tanggal 23 Juni 1784 M. Dengan bertitik tolak pada tanggal tersebut, nama Senapelan ditinggalkan sebagai gantinya yang populer adalah Pekanbaru. Kemudian pada Tanggal itu pula ditetapkan sebagai tanggal lahirnya kota Pekanbaru.

Sewaktu Jepang datang ke Pekanbaru, maka daerah baru menjadi daerah Gun Yang dikepalai oleh seorang Gun Cho dan menjadi tempat kedudukan Riau Syutjou Kang. Akhirnya di zaman Republik Indonesia berubah statusnya menjadi berbagai status yakni:

1. Hamite Pekanbaru, merupakan ibu kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946\
2. Kota kecil berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974
4. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1974³

Pengadilan Negeri Pekanbaru didirikan pada tahun 1950. Pengadilan Negeri Pekanbaru ini berada dalam wilayah tingkat II Kotamadya Pekanbaru, yaitu tepatnya di Jalan Teratai, No. 85 Sukajadi. Pendirian Pengadilan ini bertepatan dengan pemindahan ibu kota Propinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kemudian dari tahun 1950 hingga menjelang Tahun 1982,

²Maftum Sa'adiah, (Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 14 Nopember 2010

³*Ibid*

Propinsi Riau belum memiliki Pengadilan Tinggi sendiri. Oleh sebab itu apabila terjadi kasus perkara sampai ke tingkat Banding, maka perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Sumatra Barat yang berkedudukan di Padang. Setelah itu pada tahun 1982, barulah Propinsi Riau memiliki Pengadilan Tinggi Sendiri, yakni yang berkedudukan di Jalan Sudirman Sekarang⁴.

Selain Pengadilan Negeri saat ini masih ada empat (4) lagi Pengadilan di Pekanbaru, yakni:

1. Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara di tingkat Banding
2. Pengadilan Agama (PA)
3. Pengadilan Tinggi Agama yang mempunyai Kompetensi absolut untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut hukum Agama, misalnya dalam masalah perceraian dan warisan.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah banyak menyelesaikan perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Adapun perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru rata-rata berjumlah 170 kasus untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana rata-rata berjumlah 570 kasus setiap tahunnya⁵. Sedangkan di tahun 2010 itu ada 970 berkas

⁴Hj. Dessurya, (Sub Kepaniteraan Hukum), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Nopember 2010

⁵Syamsul Febri, (Wakil Sekretaris), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Nopember 2010

perkara pidana yang masuk, dan untuk perkara perdatanya itu ada 186 berkas yang masuk sampai akhir bulan tersebut⁶.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai lima (5) ruang sidang, satu ruang sidang utama yang dipergunakan untuk pemeriksaan kasus-kasus berat dan empat ruang sidang bagian untuk pemeriksaan kasus umum dan satu diantaranya bersifat tertutup seperti kasus pencabulan⁷.

Adapun dalam Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengalami pergantian ketua sebanyak Lima Belas (15) kali, yaitu:

1. Tahun 1959–1960, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sulaiman
2. Tahun 1965 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Zaidir Lamit, SH.
3. Tahun 1965 –1972, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Jalil Sati, SH.
4. Tahun 1972–1981, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Syamsul Bahri, SH
5. Tahun 1981–1983, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Wajinar Markam, SH
6. Tahun 1983–1987, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Ida Bagus Adniyana, SH.

⁶Ramlan Hasundungan, (Wakil Panitera), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2010

⁷Hj. Dessurya, (PAN MUD Hukum), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Nopember 2010

7. Tahun 1987–1990, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Setyo Harsono, SH.
8. Tahun 1990–1993, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Achmadi, SH
9. Tahun 1993–1995, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Arzan Yahya, SH
10. Tahun 1995–2000, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Yusuf Thaha, SH
11. Tahun 2000, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Krisman Sormin, SH
12. Tahun 2001–2003, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Asmal Abdullah, SH
13. Tahun 2003–2007, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh H. Sumantri, SH
14. Tahun 2008–2010, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Karel Tuppu, SH., MH⁸
15. Tahun 2010 sampai sekarang ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Ahmad Yusak, SH. MH

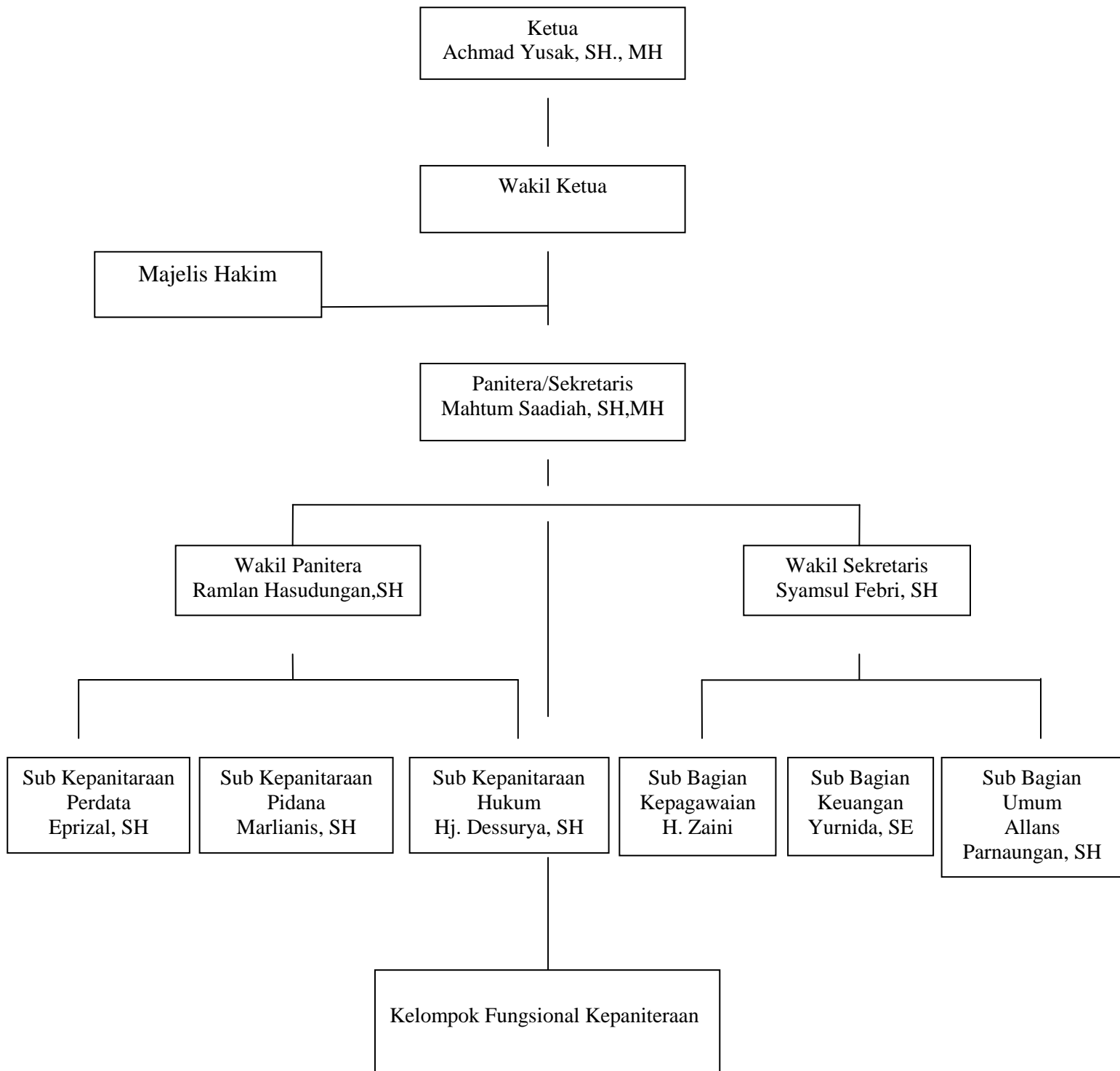
Sedangkan jumlah hakim sejak tahun 2008 sampai sekarang yang menangani perkara-perkara baik pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru seluruhnya berjumlah 13 (Tiga belas) orang, yakni⁹:

⁸ *Ibid*

⁹ Dokumen Pengadilan Negeri Pekanbaru, 18 Nopember 2010

1. Ahmad Yusak, SH., MH
2. Miani Silitonga, SH
3. Jahuri Efendi, SH
4. Saiful Azwir, SH
5. Krosbin Lumban Gaol, SH., MH
6. Pandu Budiono, SH., MH
7. Suwono, SH., M.Hum, SE
8. Minanoar Rachman, SH., MH
9. Sarah Louis. S, SH., M.Hum
10. Lilin Herlina, SH
11. Sigit Pradewa, SH., MH
12. Budi Prasetyo, SH
13. Sudjarwanto, SH., MH

Adapun stuktur organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Catatan: Setiap Sub Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Muda KA.
Sub Kepaniteraan=Panitera Muda

Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai kepala administrator dalam peradilan dan tugas penyelenggaraan administrasi. Ketua Pengadilan dibantu oleh kepala kepaniteraan sebagai penanggung jawab pelaksana administrasi umum perkara serta bendaharawan yang ada di Pengadilan Negeri tersebut.

Kepala kepaniteraan perkara dalam pelaksanaanya dibantu oleh:

1. Kepala bagian yang bertugas meregister perkara perdata.
2. Kepala bagian pidana yang bertugas meregister perkara pidana.
3. Kepala statistik dekomendasi yang bertugas antara lain;
 - a. Membuat laporan, kwartal dan tahunan perkara perdata maupun perkara pidana.
 - b. Statistik, grafik dan arsip perkara.

Sedangkan Bendahara terdiri atas:

1. Bendaharawan penerimaan
2. Bendaharawan pengeluaran

Namun masing-masing bagian terlepas antara satu dengan yang lainnya dan bekerja menurut bidangnya masing-masing. Di bidang peradilan, ketua Pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua dan beberapa orang Hakim. Khusus di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada 13 Hakim termasuk ketua

Pengadilan Negeri Pekanbaru. Apabila ketua Pengadilan bertugas keluar kota, biasanya ketua Pengadilan Negeri melimpahkan tugas-tugasnya kepada wakil ketua Pengadilan. Namun pada saat ini wakil ketua Pengadilan Negeri naik jabatan menjadi ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, dikarenakan bapak ketua pengadilan sebelumnya telah berpindah tugas ke Pengadilan Negeri kelas 1 A Jakarta Timur, disebabkan beliau diberikan suatu promosi jabatan dengan memiliki kualitas dan SDM yang baik. Dengan demikian terjadinya kekosongan jabatan pada posisi wakil ketua. Maka akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melimpahkan tugas-tugasnya kepada sekretaris dan Hakim Pengadilan Negeri tersebut¹⁰.

Ketua pengadilan sebagai administrator pengadilan berwenang menentukan biaya perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun biaya perkara tersebut ditentukan oleh ketua pengadilan, tetapi tidak menutup kemungkinan berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru secara *prodeo*¹¹.

Apabila seseorang penggugat ingin berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru secara *prodeo* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sebelum perkara di ajukan

Sebelum perkara diajukan, seseorang ingin berperkara secara *prodeo* terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri

¹⁰Dody Buana (Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru) “wawancara” tanggal 8 Nopember 2010, Pengadilan Negeri Pekanbaru

¹¹Prodeo yaitu, Biaya cuma-cuma, dalam arti kata seseorang tidak memiliki biaya untuk berperkara maka Pengadilan memberikan biaya perkara secara gratis.

Pekanbaru dengan adanya bukti Surat Keterangan Miskin yang diberikan Lurah atau Kepala Desa setempat. Maka kemudian dibuat penetapan berperkara secara *prodeo*. Penetapan tersebut nantinya merupakan dasar bagi pihak penggugat untuk mengajukan dan mendaftarkan perkara Kepaniteraan.

2. Bersamaan perkara dengan gugatan

Jika diajukan sekaligus dalam gugatan, maka terlebih dahulu diperiksa permintaan penggugat untuk berperkara secara *prodeo*, dengan memanggil tergugat atau pihak lawan. Jika pihak lawan berkeberatan atas permintaan penggugat tersebut maka lawan harus membuktikan bahwa penggugat itu orang mampu¹².

Berlainan dengan perkara pidana, yang mana apabila seorang terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang didakwa dengan hukuman 5 tahun dapat memperoleh bantuan hukumannya itu dibebankan kepada pemerintah untuk Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan perkara diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi ongkos perkara yang dibayar terdakwa, yang dalam hal ini diminta oleh jaksa penuntut umum sebagai *Exsecutornya*¹³.

Penentuan Hakim yang akan menyidangkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru di tentukan oleh Ketua Pengadilan. Dan

¹² Dokumen Pengadilan Negeri Pekanbaru, 23 Nopember 2010

¹³ Hj. Dessurya, (PAN MUD Hukum), wawancara, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Nopember 2010

untuk menentukan ketua majlis ditentukan berdasarkan senioritasnya, kepangkatan, maupun pengalamannya. Latar belakang penentuan yang demikian ini tentunya tidak terlepas dari pengalihan pengalaman pada Hakim anggota yang lebih muda pengalamannya. Majelis Hakim yang telah mendapatkan penetapan untuk memeriksa perkara dan tidak dicampuri oleh sesuatu kekuatan manapun. Hakim mempunyai hak untuk menentukan perkara yang ditanganinya dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru secara langsung tidak dapat mengawasi maupun menindak Hakim jika ada tunggakan perkara.

C. Wewenang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Didalam KUHAP diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri, wewenang tersebut sebahagian diatur didalam pasal 84, 85 dan 86, adapun isinya sebagai berikut: Pengadilan Negeri berwewenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat dia diketemukan atau ditahan. Hanya berwewenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebahagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan¹⁴.

Apabila seorang terdakwa melalaikan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri. Maka tiap pengadilan perkara pidana itu,

¹⁴Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet ke-1, h. 11-12

terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan pengabungan perkara tersebut. Dalam hal daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas tindakan Pengadilan Negeri atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud¹⁵.

Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang berwenang mengadilinya. Menurut ketentuan KUHAP terdapat beberapa acara pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Negeri yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat¹⁶

Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan

¹⁵*ibid.* h. 13

¹⁶*Ibid.* h. 14

cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHP memberi batasan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHP yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh pasal 205 KUHP ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah”¹⁷.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

Dimulai hakim ketua sidang dengan membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (pasal 153 ayat (3) KUHP). Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat (2)). Kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka batal demi

¹⁷*Ibid.* h. 14

hukum (pasal 153 ayat (4))¹⁸. Maka Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah suatu Pengadilan umum yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana meliputi semua kasus atau hak-hak yang timbul karenanya atau pidanaan¹⁹.

Wewenang Pengadilan Negeri di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolute, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).

Adapun kompetensi relatif dari pada Pengadilan Negeri diatur dalam pasal 118 HIR (pasal 142 RBG) kompetensi ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Sebagai azas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri setempat tergugat tinggal (mempunyai alamat atau berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: *actor sequiter forum rei* (pasal 118 ayat

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Saptartha Jaya, 1996), h. 245-246

¹⁹*Ibid.* h. 247

1 HIR, 142 ayat (1) RBG), jadi gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat²⁰.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat tergugat sebenarnya tinggal (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat 1 RBG)²¹.

Dari keterangan di atas dijelaskan pula bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru meliputi daerah tingkat II, maka wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah meliputi daerah tingkat II kota madya Pekanbaru yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu.

1. Sukajadi
2. Pekanbaru Kota
3. Sail
4. Lima Puluh
5. Senapelan
6. Rumbai
7. Tampan
8. Bukit Raya²²

²⁰ Sudarsono, *op.cit.*, h. 13

²¹ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), cet ke-2, h. 7

²² Dokumentasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tahun 2010

Dengan demikian maka setiap perkara yang terjadi dalam daerah tingkat II Pekanbaru merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki Visi dan Misi Sebagai Berikut²³:

1. Visi

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan public, professional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
- b. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain,
- c. Memperbaiki akses pelayanan hukum dan peradilan.
- d. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas, bias dipercaya dan transparan²⁴.

²³Departemen Hukum dan Ham, Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2010, Cet ke-15, h. 7

²⁴ *Ibid.* h. 17

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI KEJAHATAN

A. Perlindungan Saksi Kejahatan Dalam Konteks Undang-Undang

Republik Indonesia

Mengenai perlindungan kepada saksi kejahatan didalam lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi kejahatan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban pada bab 1 pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban yang dianut oleh LPSK menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 yaitu berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum⁴¹

Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib

⁴¹Afnil Guza, *Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. ke-1, h. 20

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai yang diamanatkan di dalam undang-undang. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Maka saksi kejahatan dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan di tahap proses peradilan berhak memperoleh perlindungan terhadap pribadinya.

Dalam konteks hukum kenegaraan sebagai undang-undang yang di canangkan oleh DPR untuk masuk kedalam Proglenas adalah merupakan sistem aturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan bahasa lain hukum kenegaraan adalah sebagai hukum politik dalam arti hukum yang mengatur tata cara kehidupan politik suatu Negara . dalam perkembangan hukum saat sekarang ini hukum kenegaraan sering disebut dengan hukum politik⁴².

Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara. Di dalam pengertian sederhana tersebut, hukum ataupun perundang-undangan ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum atau perundang-undangan lama oleh Negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan Negara. Meskipun hukum dikatakan sebagai alat perundang-undangan, di dalamnya terletak hakikat supremasi hukum,

⁴²Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 70, Cet ke-5

sebab hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara, bukan sebagai alat rekayasa politik (*political engineering*). Dengan demikian, supremasi hukum harus diartikan meletakkan hukum sebagai sentral pengarah dan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan Negara melalui politik hukum nasional bukan sebagai instrument untuk mendukung kemauan eksekutif atau pemerintah yang sedang berkuasa⁴³.

Politik hukum pasca amandemen UUD 1945 juga mengenal program legislasi nasional (Prolegnas) dan program legislasi daerah (Prolegda) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang hirerki perundang-undangan. Proglenas dapat disebut sebagai penjabaran politik hukum untuk mencapai tujuan Negara dalam priode tertentu. Didalam Prolegnas dimuat semua rencana Undang-Undang yang akan dibuat dalam lima tahun yang dapat dipenggal-penggal lagi berdasarkan prioritas tahunan. Dari Proglenas dapat diketahui politik hukum selama lima tahun dan prioritasnya setiap tahun. Namun, harus diingat pula bahwa Proglenas bukan hanya berisi rencana hukum yang akan dibuat atau akan diganti, melainkan sekaligus merupakan pedoman atau mekanisme pembuatan undang-undang yang mengikat. Artinya, prosedur dan mekanisme pembuatan hukum haruslah melalui Proglenas, yakni pertama-tama harus disepakati daftar RUU lima tahunan oleh DPR dan pemerintah untuk kemudian dibuat prioritas tahunan yang juga disepakati oleh DPR dan pemerintah. Setiap undang-undang yang akan dibuat haruslah lebih dulu masuk dalam Prolegnas. Tak satupun RUU

⁴³Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 61, Cet ke-1

boleh dibahas tanpa ada didalam Prolegnas. Kalau itu dilakukan berarti terjadi pelanggaran prosedur yang dapat dimintakan pengujian pormal kemahkamah konstitusi. Selain menguji materi, Mahkamah Konstitusi memang berwenang juga melakukan uji formal (prosedur) dengan akibat dibatalkannya sebuah undang-undang. Jika sebuah undang-undang terkena uji formal (karena kesalahan prosedur) maka yang dibatalkan dapat meliputi seluruh undang-undang tersebut; sedangkan jika sebuah undang-undang dikenakan uji materi maka yang dapat dibatalkan adalah bagian-bagian atau pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji⁴⁴.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, Polisi, Jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

⁴⁴*Ibid.* h. 62

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR⁴⁵.

Indonesia meratifikasi *UN Convention Against Corruption* pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas

⁴⁵<http://www.google.co.id/search>, *struktur organisasi LPSK*, tanggal 15 Januari 2010

adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi⁴⁶.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut⁴⁷.

11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana⁴⁸.

Berdasarkan atas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri Negara Hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sejalan dengan asas kesamaan hukum tersebut, untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

B. Pengertian Saksi dan Kejahatan

1. Pengertian Saksi

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 butir 26 menjelaskan yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13

⁴⁸ *Ibid*

Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja. Dan pada butir 27 menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu⁴⁹.

Sedangkan subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang berperkara⁵⁰. Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia

⁴⁹ Solehuddin, *op.cit.*, h. 149

⁵⁰ Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1976), Cet ke- 3 h. 83.

belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan⁵¹. Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benarbenar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Dalam Pasal 139 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), menerangkan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan⁵². Sedangkan dalam hukum islam saksi disebut dengan *syahid* (Saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata

⁵¹ Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1981), Cet ke- 2 h.49

⁵² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet ke-5, h. 40

”*musyhadah*” yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan di sini adalah manusia.

Dasar alat bukti saksi pada pasal 139-152 HIR dan 168-172 RBG, pasal 165-179 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang terdapat pada pasal 1902-1912 KUHPer. Adapun dasarnya menurut agama Islam ialah⁵³: al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282:

Artinya: ”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika

⁵³H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet ke-10, h. 152

yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil”⁵⁴.

Dengan demikian bahwasanya pengertian saksi tersebut memiliki tujuan yang sama yakni dengan dapat memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan dengan melalui apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

2. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada defenisi baku yang ada didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.

Munculnya perbedaaan dalam pengertian kejahatan dikarenakan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di samping itu tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Dimana kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya, . Sedangkan kriminologi memiliki pengertian yaitu, ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁵⁵.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah

⁵⁴*Ibid.* h. 152

⁵⁵ Mr. W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta : PT.Pembangunan, 1995), Cet. ke-7, h. 19

laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat⁵⁶.

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap pelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuannya itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut⁵⁷.

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, perumusan kejahatan menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum pidana⁵⁸.

Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan "tingkah laku" yang diberikan masyarakat pada perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah, apakah masyarakat secara umum akan mendirikan kerugian ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan, sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.

⁵⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, Dan Hukum* (Bandung : Refika Aditama, 2004), Cet ke- 1 h. 52

⁵⁷ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *op.cit.*, h. 56

⁵⁸ *Ibid.* h. 56

Dalam hal ini korban dan saksi mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah, hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan⁵⁹.

Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalau berupa kerugian materil, atau penderitaan fisik saja tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Dengan demikian saksi kejahatan dapat disebutkan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan memberikan keterangan dan pengetahuannya itu.

C. Syarat-Syarat Saksi

Syarat seorang saksi ini tidak terkecuali dalam arti siapapun dapat menjadi saksi pada umumnya. Namun ternyata ada suatu pasal yang menyebabkan

⁵⁹*Ibid.* h. 145

seorang tersebut tidak diperbolehkan menjadi saksi, yaitu pada pasal 168 KUHAP yang menyebutkan⁶⁰:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat yang ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai ataupun yang bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

Demikian bagan dalam suatu susunan keluarga yang menyangkut masalah derajat keluarga sebagai penjelasan dalam ketentuan pasal 168 KUHAP yang tersebut di atas. Dimana mereka ini sebagai yang terkecuali untuk menjadi saksi (tidak diperbolehkan).

Perkecualian sebagai saksi tersebut juga tercantum dalam ketentuan pasal 170 KUHAP, karena pekerjaannya maka dibebaskan dari kewajiban jadi saksi, mengingat harkat dan martabat atau jabatannya sebagai yang diwajibkan sebagai rahasianya, dimana kekecualian ini di sebutnya sebagai kekecualian relatif, mengingat bunyi ketentuan yang mengatakan:

”Dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi...” KUHAP pasal 171. Maka berarti apabila ia memang bersedia

⁶⁰ Hendrastanto Yudowidagdo, Dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), Cet, ke- 1, h. 242

menjadi saksi, maka dalam hal ini dapat diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.

Adapun orang-orang seperti ini dapat disebutkan, umpamanya :

1. seorang dokter harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya, yang kemungkinan akan berakibat fatal bagi si pasien tersebut akibat goncangan jiwa setelah mengetahui penyakit yang dideritanya.
2. seorang pastur agama katolik roma. Ia berhubung dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastur tersebut⁶¹.

Juga salah satu kekecualian menjadi saksi yang terdapat dalam ketentuan pasal 171 KUHAP, tentang anak dibawah umur dan orang sakit ingatan, kesaksian ini diberikan dibawah sumpah mengingat hal-hal tersebut. Dan uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali⁶².

Disini jelas bahwa mengucapkan sumpah tersebut merupakan syarat muthlak. Dan bagaimana cara mengucapkan sumpah yang diucapkan dari seorang saksi dapat dilihat dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan :

*” sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya ”*⁶³.

⁶¹ *Ibid.* 243

⁶² *Ibid.* h. 244

Juga dalam hal syarat mutlak bagi saksi untuk mengucapkan sumpah tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Sedangkan dalam pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Menjelaskan yaitu: orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berfikir sehat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.

Juga hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tidak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana dia mengetahuinya, hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk kearah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian tersebut.

Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberikan kesaksian ini, ada beberapa pengecualiannya yaitu⁶⁴:

⁶³ Sholehuddin, *op.cit.* h. 187

⁶⁴ M. Nur Rasaid, *op.cit.*, h. 123

a. Ada segolongan yang tidak mampu (tidak dapat) untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan yang tidak mampu secara relatif.

1. Yang termasuk tidak mampu secara mutlak, di sini hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi, yaitu:

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.

b. Suami/ istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.

2. Yang termasuk tidak mampu secara relatif, mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, yaitu:

a. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun.

b. Orang gila, meski kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah.

b. Ada segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini adalah:

1) Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan, dari salah satu pihak.

2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus, dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.

- 3) Seseorang yang karena martabatnya, pekerjaan, atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.

Sedangkan syarat-syarat saksi menurut Hukum Positif di Indonesia adalah saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut⁶⁵:

a. Syarat formil saksi

1. Berumur 15 tahun keatas
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR);
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinahan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), Cet. ke-1, h. 70-73

10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)⁶⁶.

b. Syarat materiil saksi

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R. Bg).
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R. Bg).
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) RBG).
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR).
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

D. Jenis - Jenis Saksi

Pembuktian merupakan bagian yang dipandang paling penting dalam hukum acara pidana, untuk mencari kebenaran dalam menemukan kebenaran materiil dan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini telah diatur dalam pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah, yang dapat diajukan didalam persidangan. Salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi tersebut⁶⁷.

Secara global dalam praktek peradilan kerap kali ditemukan adanya beberapa jenis saksi antara lain dapat disebutkan sebagai berikut⁶⁸:

1. Saksi a Charge dan Saksi a De Charge

⁶⁶*Ibid.* h. 167

⁶⁷Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), Cet. Ke-1, h. 67.

⁶⁸Lilik Mulyadi, *op.cit.*, h. 82

Pada dasarnya menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa atau penuntut umum. Sedangkan *saksi a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Mengenai saksi yang meringankan (*a de charge*) dijelaskan dalam pasal 65 KUHAP, "*tersangka atau terdakwa berhak untuk menggusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*"⁶⁹, dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan, seorang terdakwa memiliki hak untuk membela diri, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 116 ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan. Jika saksi menghendaki adanya saksi (*a de charge*) penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Saksi (*a de charge*) yang tercantum kedalam surat pelimpahan perkara, pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum. Namun, saksi (*a de charge*) yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum, pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum itu

⁶⁹ Solehuddin, *op.cit.* h. 163

sendiri. Dengan begitu, penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum dapat saling menghadapi saksi⁷⁰.

Hakim ketua majelis didalam persidangan wajib mendengarkan saksi (*a de charge*), baik yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maupun yang diminta penuntut umum. Jadi, pengertian dari saksi (*a de charge*) atau saksi yang menguntungkan tersangka/terdakwa adalah saksi yang dipilih atau yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringgankan terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan mengajukan saksi, tersangka atau terdakwa berharap dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau akan diputus bebas. hal tersebut bukan sesuatu tidak mungkin, karena dalam pembuktian, selain berdasar ketentuan undang-undang, juga berdasar keyakinan hakim.

Dalam hal ini berdasarkan asas keseimbangan yang dianut oleh KUHAP, selain kebebasan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang memberatkan atau yang meringankan tersangka/terdakwa, terdakwa atau tersangka juga memiliki hak untuk membantah keterangan yang diucapkan oleh saksi didepan persidangan. Hak ini diatur didalam pasal 164 ayat (1) KUHAP yang menegaskan, "setiap kali seorang saksi selesai

⁷⁰Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, op.cit., h. 57

memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”⁷¹.

Namun, dalam perakteknya sering terjadi kewajiban hakim menanyakan pendapat terdakwa terhadap keterangan saksi sekedar formalitas. Bahkan, majelis hakim sering tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membantah keterangan saksi atau majelis hakim tidak serius menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi keberatan dari terdakwa atas keterangan saksi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, disarankan agar terdakwa atau pengacara hukum aktif dalam melakukan upaya keberatan secara langsung, sesaat setelah saksi membacakan keterangannya.

Namun secara teoritik berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa:

“Dalam hal ada saksi yang mengguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau juga penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum diajukan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”⁷²

Penerapan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP tersebut, ternyata dalam peraktek peradilan ketentuan pasal 160 (1) huruf c KUHAP khususnta kata “wajib” diterapkan secara pleksibel dengan titik tolak isi surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 1985 di sebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk

⁷¹*Ibid. h. 58-59*

⁷²Solehuddin, *op.cit.* h. 163

dihadirkan di depan sidang pengadilan di samping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan Negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir disidang pengadilan dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir dipersidangan sebab memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara.

Dengan demikian, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 503/TU/1796/Pid/90 tanggal 22 september 1990 tentang bidang tindak pidana umum maka Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan “wajib” diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh hakim ketua majlis untuk didengar keterangannya didepan sidang.

2. Saksi Vurbalisant

Secara pundamental kata vurbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam peraktek serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrinnya, vurbalisan adalah : “nama yang diberikan

kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, S.H, Etwin Rudi, S.H dan Prasetyo JT menyebutkan bahwa: “*vurbalisant*” adalah pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara, misalnya, polisi, jaksa⁷³.

Menurut Yan Prametya Puspa bahwa: “*vurbalisan* (belanda) adalah petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang process perbal”⁷⁴.

Dengan demikian, apabila dititik dari sisi praktek peradilan, eksistensi saksi purbalisan tampak jika dalam persidangan menyangkal keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa disidang pengadilan berbeda dengan keterangan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik serta derdakwa/saksi mencabut/menarik keterangan pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik karena adanya tekanan, baik bersifat fisik maupun psikis.

3. Saksi Mahkota (*kroon gtuiige*)

Dari kejadian teortik dalam KUHAP tidaklah ditemukan pengaturan mengenai saksi mahkota atau *kroon atuige*. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dimana kepadanya diberikan suatu “mahkota”. Dengan demikian, berdasarkan visi

⁷³ Lilik Mulyadi. *op.cit.*, h. 83

⁷⁴ *Ibid.* h. 83

peraktik peradilan maka asasnya saksi mahkota mempunyai sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab 1 pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b. Bahwa saksi mahkota tersebut diambil dari salah seorang tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab 1 pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa adalah seseorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (Bab 1 angka 15 KUHAP). dengan demikian, kontek tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada satu tindak pidana dimana pelakunya/ tersangka atau terdakwa lebih dari seseorang atau saksi itu adalah seorang diantara tersangka/ terdakwa dengan peranan paling kecil artinya bukan pelaku utama.
- c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan “Mahkota” dalam artian saksi tersebut diberikan “Kehormatan” berupa pelakuan istimewa, yaitu tidak tertuntut atas tindak pidana dimana ia sebeanarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya⁷⁵.

Dalam peraktek pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu tidak jarang dijumpai bahwa penyidik sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin

⁷⁵ *Ibid.* h. 85

untuk mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiannya. Maka dari itu, salah satu cara untuk membongkar sindikat kejahatan tersebut kemudian penyidik dapat memerintahkan anggotanya sebagai penyidik untuk ikut bergabung dalam sindikat tersebut sebagai salah seorang pelaku kejahatan atau mengambil salah seorang anggota sindikat tersebut untuk dijadikan saksi mahkota atas tindak pidana yang dilakukan tindak pidana yang bersangkutan.

D. Kegunaan Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kegunaan kesaksiannya mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu di perhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar nantinya kegunaan seorang saksi dalam memberikan keterangan dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut⁷⁶:

1. Harus Mengucapkan Sumpah Atau Janji

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan: "wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

1. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,

⁷⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet ke-11, h. 286

2. Lapal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Sumpah atau janji itu diucapkan menurut ketentuan pasal 160 ayat (3), pada priendsifnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji:

1. Pada priendsifnya wajib diucapkan "sebelum" saksi memberi keterangan.
2. Tapi yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan "sesudah saksi memberi keterangan"⁷⁷.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- a. dapat dikenakan sandera.
- b. Penyenderaan dilakukan berdasarkan "penetapan" hakim ketua sidang.
- c. Penyenderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (pasal 161).

2. Memberikan Keterangan Guna Kepentingan Pemeriksaan

Dalam hal saksi memberikan keterangan ketika pemeriksaan dipengadilan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

1. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

⁷⁷ *Ibid.* h. 286

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu:

- a. yang saksi lihat sendiri
- b. saksi dengar sendiri
- c. dan saksi alami sendiri
- d. serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu⁷⁸

Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi. "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b) "*Tertimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

⁷⁸ *Ibid.* h. 287

c) "Pendapat" atau "terkaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan mahkamah agung tanggal 15 Maret 1984 Reg.No.20 PK/PID/1983. dalam putusan ini ditegaskan bahwa: "orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah"⁷⁹.

2. Keterangan Saksi Harus Diberikan Di sidang Pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dalam "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dalam penegasan pasal 185 ayat (1). Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang

⁷⁹*Ibid.* h. 287

pengadilan (*aut side de court*) bukan alat bukti tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya.

Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan disidnag pengadilan.

3. Keterangan Seorang Saksi Saja Tidak Dianggap Cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Dengan demikian keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus terstis nullus terstis*" ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan

saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap "*munzir*" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullus testis*". Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Dalam hal demikian seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena isamping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan "*de dekze of evizance*", yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2) adalah:

1. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi".
2. kalau saksi yang hanya ada terdiri dari seseorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain⁸⁰.

Dengan demikian dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan undang-undang, karena hanya ada seorang saksi saja. Jadi, agar supaya keterangan saksi tunggal

⁸⁰*Ibid*, h. 288

memiliki pembuktian yang dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa.

4. Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengarkannya disidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara "kualitatif" memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling "berdiri sendiri" tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Tanggal 17-4-1978, No.28 K/Kr./1977 yang menegaskan "keterangan saksi satu saja, sedangkan terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa". Dalam perkara ini ternyata ada

beberapa orang saksi yang dapat didengar keterangannya di sidang pengadilan⁸¹.

Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Disinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tetapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh pasal 185 ayat (4) yang menegaskan:

1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
2. Apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu⁸².

Dari ketentuan pasal 185 ayat (4) tersebut, menjelaskan bahwa sahnya keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang

⁸¹*Ibid*, h. 289

⁸²*Ibid*. h. 290

lainnya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan "saksi tunggal" yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Apabila keterangan para saksi yang banyak "saling bertentangan" antara yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu, harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.

BAB IV
PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006

A. Perlindungan Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai yang di amanatkan didalam undang-undang. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi ketika di periksa dipengadilan Negeri Pekanbaru masih memperoleh perlindungan secara hukum dan mendapatkan pengamanan dan pengayoman sepanjang saksi meminta berupa perlindungan kepada para aparat kepolisian, dan itu hanya memiliki batas tertentu artinya ketika satu sampai tiga hari saksi masih bisa untuk diberikan rasa keamanan, akan tetapi setelah itu saksi hanya dibiarkan seperti layaknya masyarakat biasa yang tetap tidak memperoleh perlindungan sama sekali, kalau saksi hanya diam saja tidak meminta perlindungan kepada aparat kepolisian dengan kata lain saksi sama saja tidak memperoleh perlindungan sesuai yang diinginkan oleh setiap manusia. Dalam hal

ini perlunya perlindungan yang harus diberikan kepada saksi kejahatan tersebut dalam memberikan keterangannya pada waktu tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemeriksaan saksi sangat perlu untuk dilakukan di setiap Pengadilan, baik Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, maupun Pengadilan Negeri tersebut. Mengingat saksi merupakan sebagai kunci utama untuk membongkar kejahatan dan menyatakan di dalam persidangan terhadap terdakwa atau tersangka dalam melakukan kejahatan mengenai mereka dapat dinyatakan bersalah atau tidak nya di pengadilan, sebab pengadilanlah yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana kejahatan⁷⁶.

Dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan di persidangan tidak semua saksi itu merasa berani untuk memberikannya dan terkadang diantara mereka ada yang takut dan sulit untuk dijadikan saksi, dikarenakan susah nya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum terhadap pribadi mereka. Berikut akan dikemukakan jawaban responden yang merasa takut untuk dihadirkan kedalam persidangan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁷⁷

⁷⁶Abdul Hakim (Pengacara/Advokat), *wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Nopember 2010

Tabel I
Saksi Yang Merasa Takut Ketika Dihadirkan Dipersidangan
Untuk Memberikan Kesaksian

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Takut	15	50,00 %
2	Kurang takut	9	30,00 %
3	Tidak takut	6	20,00 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwasanya sebanyak 15 orang dari persentase 50,00% yang menyatakan merasa takut ketika ingin dijadikan saksi dalam persidangan, 9 orang atau 30,00% menjawab kurang takut ketika ingin dijadikan saksi kejahatan, dan sisanya sebanyak 6 orang dengan persentasenya 20,00% yang menjawab tidak takut. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden dianggap takut untuk dijadikan saksi kejahatan dalam memberikan keterangan di persidangan.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru membuat saksi merasa takut untuk dijadikan seorang saksi, apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan

tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketehau, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi.

Krosbin Lumbagaol, SH, MH, mengatakan berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri⁷⁸. Maka kebanyakan saksi itu merasa takut ingin dimintakan kesaksiannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Didalam aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Aturan-atran itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi yang mengatur tentang hak manusia dalam kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat⁷⁹.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai

⁷⁸Krosbin Lumbagaol (Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 25 Nopember 2010

⁷⁹R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet Ke-2, h. 190

pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti sorang tersangka/terdakwa⁸⁰.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman

⁸⁰[www.http://search.handycave](http://search.handycave). *Mengenai perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan*, tanggal 13 oktober 2010

baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana, dikarenakan saksi itu sendiri terkadang ada yang mendapatkan tekanan ataupun intimidasi dari pihak tertentu yang mengakibatkan saksi susah dan sukar untuk memberikan keterangannya dalam proses pemeriksaan tersebut.

Maka berikut ini akan dikemukakan jawaban responden yang pernah mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak manapun sebelum memberikan kesaksiannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II
Saksi Yang Pernah Mendapatkan Tekanan/Intimidasi Dari Pihak Manapun
Sebelum Memberikan Kesaksian

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Pernah	6	20,00 %
2	Kadang-kadang	9	30,00 %
3	Tidak pernah	15	50,00 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwasanya responden yang mendapatkan tekanan sebelum memberikan kesaksian menjawab 6 orang dengan persentase 20,00%, sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang pernah mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak manapun berjumlah 9 orang atau

30,00%, sedangkan sisahnya yang berjumlah 15 orang atau dengan persentasenya 50,00% yang menjawab tidak pernah mendapatkan tekanan/intimidasi dari siapapun sebelum memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam hal melakukan kesaksian yang ia berikan terkadang saksi juga selalu memperoleh tekanan yang sifatnya langsung maupun melalui via sms atau telpon dari orang lain, dan ini menandakan bahwa lemahnya perlindungan yang diberikan terhadap saksi kejahatan yang secara jelas ingin di lindungi oleh aparat penegak hukum⁸¹. Kalau diketahui pada hakikatnya hukum itu diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik itu yang berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat, maupun suatu lembaga. Dimana hukum itu merupakan bentuk perumusan kehendak, nilai dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran⁸². Oleh karena itu saksi sebagai kunci utama dalam mencari kebenaran sudah seharusnya di jaga dan dilindungi hak maupun jiwanya dari ancaman-ancaman yang sifatnya membahayakan dirinya pada tahap proses pemberian keterangan di sidang pengadilan. Untuk mengetahui bagaimana keadaan saksi sesudah memberikan keterangannya di persidangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁸¹Edwin (Pengacara/Advokat), *wawancara*, Jalan Suka Karya, Panam, tanggal 6 Nopember 2010

⁸²Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet ke-1, h. 12

Tabel III
Keadaan Saksi Sesudah Memberikan Keterangan Di Persidangan

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Tertekkan	16	55,66 %
2	Terancam	10	33,33 %
3	Troma	4	15,00 %
Jumlah		300	100 %

Dari tabel di atas dapat diambil gambarannya bahwa saksi sesudah memberikan keterangannya di persidangan masih lebih banyak mendapatkan tekanan atau intimidasi sesuai dengan alternatif jawaban responden yang pernah mendapatkan tekanan/intimidasi sebanyak 16 orang atau 55,66% sedangkan yang merasa terancam dirinya itu menjawab sebanyak 10 orang atau 33,33%, dan sisahnya sebanyak 4 orang dengan persentase 15,00% yang menyatakan troma ketika selesai memberikan keterannya dalam waktu selesai pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dengan ketentuan diatas dapat di lihat dengan cermat bahwasanya saksi itu tidak semua merasa aman dari gangguan dan ancaman siapapun, sebab terkadang kita tidak mengetahui kapan dan dimana ia memperoleh tindakan yang akan mengancam dirinya.

Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan dari pihak penegak hukum yang dapat lebih antusias lagi untuk memberikan perlindungan secara efektif terhadap saksi kejahatan tersebut. Maka dapat kita ketahui sejauh mana saksi itu dilindungi jiwanya dari ancaman dan tindakan intimidasi dari pihak manapun, yang akan dilindungi oleh aparat penegak hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV

Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dari Aparat Penegak Hukum

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Pernah	10	33,33 %
2	Kadang-kadang	8	26,66 %
3	Tidak pernah	12	40,00 %
Jumlah		30	100 %

Dari tabel di atas dapat diambil gambaran bahwa responden yang menjawab pernah memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum itu sebanyak 10 orang atau 33,33%, dan yang menjawab kadang-kadang pernah merasa mendapatkan perlindungan berjumlah 8 orang atau 26,66%, sedangkan sisanya sebanyak 12 orang dengan persentase 40,00% yang lebih berdominan tidak pernah merasa dilindungi oleh aparat penegak hukum apalagi dari pihak kepolisian. Dengan ini menyatakan bahwa sangat lemahnya hukum yang diberikan terhadap saksi kejahatan serta rendahnya tingkat perlindungan yang telah diberikan kepada saksi kejahatan tersebut.

Kesaksian yang berkualitas itu hanya akan dapat diperoleh jika ancaman-ancaman, baik yang bersifat fisik maupun psikis, terhadap saksi, dan kerugian-kerugian materiil serta berbagai masalah lainnya yang menjadi kendala dapat dilenyapkan.

Oleh karena itu dapat pula dijelaskan mengenai saksi yang dirinya masih dalam posisi dilindungi dari aparat penegak hukum setelah memberikan kesaksiannya, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V

**Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dari Aparat Penegak Hukum
Setelah Memberikan Kesaksian**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ada	9	30,00 %
2	Tidak ada	16	53,33 %
3	Tidak tahu	5	16,66 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 9 orang atau 30,00% responden menjawab tetap dalam posisi dilindungi dari aparat penegak hukum setelah memberikan kesaksiannya, dan 15 orang dengan persentase 53,33% menjawab tidak lagi mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum setelah memberikan keterangan kesaksiannya, sedangkan sisahnya sebanyak 5 orang atau 16,66% yang menjawab tidak tahu mengenai apakah

mereka itu masih dalam posisi dilindungi atau tidak, dikarenakan adanya ketidakpastian dan kejelasan hukum terhadap mereka serta ketidak tahuan tentang perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap mereka sebagai saksi kejahatan.

Hal ini yang perlu diperhatikan, terhadap saksi kejahatan dalam memberikan keterangannya dimuka persidangan baik itu sebelum maupun setelah memeberikan kesaksian, yang mana mereka itu sangat membutuhkan perlindungan yang secara jelas yang harus diberikan dari para aparat penegak hukum terutama dari pihak Kepolisian.

Disamping itu adanya juga yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi kejahatan dan aturan-aturan itu dapat juga ditemukan pada KUHAP yaitu:

1. Pasal 117 ayat (1), yang menyebutkan "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun."
2. Pasal 118, yang menyebutkan "Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya."
3. Pasal 166, yang menyebutkan "Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi."

4. Pasal 177, yang menyebutkan "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan."
5. Pasal 178, yang menyebutkan "Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu."
6. Pasal 229, yang menyebutkan "Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku⁸³."

Selain di dalam KUHAP, ditemukan pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan implisit mengenai perlindungan saksi itu, yakni ketentuan Pasal 335 KUHP. Ketentuan itu mengancam dengan pidana perbuatan yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya kalau kita ketahui semua orang senang apabila memperoleh perlindungan hukum terhadap pribadinya, apalagi seorang saksi kejahatan dimana ia sebagai ujung tombak dalam memberikan keterangan dimuka persidangan

⁸³ Sholehuddin, *op.cit.*,h. 203

didalam alat bukti yang menempatkan saksi itu sebagai posisi pertama. Oleh karena itu saksi yang apabila mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum pasti akan lebih merasa senang dan nyaman terhadap dirinya. Maka dapat dilihat jawaban responden ketika memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum yang dapat pula dilihat di bawah ini:

Tabel VI
Keadaan Saksi Ketika Memperoleh Perlindungan Dari Aparat
Penegak Hukum

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Senang	18	60,00 %
2	Cukup senang	5	16,66 %
3	Amat senang	7	23,33 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebanyak 18 orang atau 60,00 % responden menjawab senang akan memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum setelah memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 5 orang atau 16,66% responden menjawab cukup senang, sedangkan sisanya 7 orang atau 23,33% responden menjawab amat senang akan memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa responden dianggap senang akan adanya perlindungan dari aparat penegak hukum yang

secara efektif yang akan di berikan kepada saksi, baik disebelum maupun sesudah saksi memberikan keterangannya di Pengadilan Negeri tersebut. Dapat juga diketahui bahwa sanya sangat rendahnya perlindungan yang akan diberikan terhadap saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. Faktor Yang Menyebabkan Perlindungan Bagi Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Yuli lubis, SH mengatakan bahwa saksi itu terkadang diberikan keamanan terhadap dirinya agar saksi tidak lagi merasa takut untuk dihadirkan di persidangan dan dapat nantinya secara leluasa memberikan keterangan dalam pemeriksaan di persidangan, dengan adanya jaminan dari para penegak hukum yang berada didalam pengadilan tersebut⁸⁴. Sehingga saksi dapat secara leluasa untuk memberikan keterangan sewaktu di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan apa yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban atau saksi baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan, kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi kejahatan maupun bagi saksi lainnya. Berikut akan dikemukakan jawaban

⁸⁴ Yuli Lubis (Penuntun Umum/Jaksa), *wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Nopember 2010

responden tentang ketakutan mereka dijadikan saksi sewaktu pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VII
Perasaan Saksi Kejahatan Sewaktu Dalam Proses Pemeriksaan

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Takut	12	40,00 %
2	Kurang takut	10	33,33 %
3	Tidak takut	8	26,66 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 orang atau 40,00% responden menjawab takut dijadikan saksi kejahatan sewaktu proses pemeriksaan, dan 10 orang atau 33,33% menjawab kurang takut, sedangkan sisanya berjumlah 8 orang dengan persentase 26,66% menjawab tidak takut akan di jadikan seorang saksi kejahatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kesaksian yang akan diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan siapapun atau dalam bentuk apapun seperti intimidasi, menakut-nakuti, atau menyiksa fisik. Sementara itu keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat atas kekuatan

sumpah jabatan kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya⁸⁵.

Maka dapat dilihat saksi yang membubuhkan tanda taggannya sebelum ataupun sesudah diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VIII

Saksi Membubuhkan Tanda Tangannya Sebelum Atau Sesudah Diperiksa

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ada	11	36,66 %
2	Tidak tahu	8	26,66 %
3	Tidak ada	11	36,66 %
Jumlah		30	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sanya saksi/responden yang ada membubuhkan tanda tangannya sebelum dan sesudah diperiksa sebanyak 11 orang atau 36,66%, dan yang menjawab tidak tahu apakah mereka itu ada ataupun tidaknya untuk membubuhkan tanda tanggan sebelum atau sesudah diperiksa berjumlah 8 atau 26,66% sedangkan sisahnya berjumlah 11 orang dengan persentase 36,66% yang menyatakan dirinya tidak pernah membubuhkan tanda tanggan sebelum ataupun sesudah diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁸⁵H. Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta selatan: CV. Visimedia, 2009), Cet ke-1, h. 40-41

Dengan demikian seorang saksi juga ada yang memberikan tanda tangannya dan ada juga yang tidak membubuhkannya tergantung apakah ada majelis hakim yang memerintahkan untuk ditanda tangannya suatu berkas yang dianggap penting untuk ditanda tangani yang mana telah disediakan oleh hakim didalam persidangan. Dimana didalam berita acara pemeriksaan yang disediakan oleh penyidik sebelumnya tidak ada ditandatangani oleh saksi, karna saksi boleh saja tidak membubuhkan tanda tangannya dan penyidik juga tidak perlu untuk memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya⁸⁶. Maka dapat diketahui bahwa adanya ketidak sinkronisasi mengenai perlindungan terhadap saksi itu sendiri disebabkan faktor terhadap saksi masih ada yang tidak membubuhkan tanda tangannya sewaktu pemeriksaan yang mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian perlindungan hukum diatas nota kesepekatan antara saksi yang hendak memberikan keterangannya.

Oleh karena itu dapat pula di ketahui sebelum ataupun sesudah mebubuhkan tanda tangannya, apakah saksi kejahatan itu ada ditanya oleh hakim, jaksa, atau juga penasehat hukum terdakwa sewaktu dalam pemeriksaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁸⁶*Ibid.* h. 41

Tabel IX

Saksi Kejahatan Ditanya Oleh Hakim, Jaksa, Dan Penasehat Hukum

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Sering	6	20,00 %
2	Ada	18	60,00 %
3	Kadang-kadang	6	20,00 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 6 orang atau 20,00% responden menjawab bahwa mereka itu sering di tanya oleh hakim, jaksa, dan juga penasehat hukum , 18 orang atau 60,00% responden menjawab ada juga ditanya hakim, jaksa, dan juga pengacara atau penasehat hukum dari terdakwa atau tersangka, sedangkan sisanya berjumlah 6 orang atau 20,00% responden menjawab kadang-kadang ada di tanya oleh hakim, jaksa, maupun penasehat hukum.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden itu menyatakan ada dan/atau pernah di tanya oleh para hakim, jaksa,dan juga penasehat hukum terdakwa sewaktu dalam proses pemeriksaan di persidangan. Mengingat sangat perlunya keterangan saksi yang memiliki peranan penting didalam pemeriksaan yang dijadikan sebagai alat bukti.

Pertanyaan terhadap saksi dilakukan "melalui perantaraan" ketua sidang sesuai ketentuan undang-undang, pertanyaan yang diajukan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum kepada saksi, harus melalui perantaraan ketua sidang. Dalam praktek, pengertian melalui perantaraan hakim cukup minta izin kepada ketua sidang, agar diberi kesempatan langsung mengajukan pertanyaan kepada saksi. Akan tetapi sebaliknya, tidak jarang dijumpai pertanyaan yang diajukan penuntut umum, jaksa dan juga hakim sangat bersifat menjerat, disana sini berbaur ancaman atau intimidasi, dan menjurus kearah pelanggaran hukum, atau juga sering pertanyaan yang diajukan penasehat hukum sangat samar, mengambang, dan asal bertanya, dan sering melantur diluar peristiwa pidana yang sedang diperiksa, atau bisa jadi pertanyaan yang diajukan penasehat hukum sifatnya mempersulit jalannya pemeriksaan. Kadang-kadang hanya sekedar mencari popularitas secara tidak proporsional⁸⁷.

Maka disini dapat dilihat sejauh mana saksi kejahatan memperoleh atau mendapatkan pertanyaan yang menjerat yang telah diberikan oleh para penegak hukum sewaktu proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berikut akan di kemukakan jawaban responden yang pernah mendapatkan pertanyaan yang menjerat dari hakim, jaksa, penasehat hukum (Pengacara/Advokat) sewaktu diperiksa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁸⁷M. Yahya Harahap, *op.,cit*, h. 188

Tabel X
Saksi Mendapatkan Pertanyaan Yang Menjerat Dari Hakim,
Jaksa, Penasehat Hukum Sewaktu Diperiksa

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Pernah	10	33,33 %
2	Kadang-kadang	12	40,00 %
3	Tidak pernah	8	26,66 %
Jumlah		300	100 %

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebanyak 10 orang atau 33,33% responden menjawab pernah mendapatkan pertanyaan menjerat dari hakim, jaksa, maupun penasehat hukum terdakwa, dan 12 orang atau 40,00% responden menjawab terkadang juga mendapat pertanyaan yang menjerat terhadap pribadi mereka sewaktu memberikan keterangan di persidangan, sedangkan sisanya berjumlah 8 orang atau dengan persentase 26,66% menjawab tidak pernah mendapatkan pertanyaan yang menjerat dari hakim, Jaksa dan juga Penasehat Hukum/ Advokat.

Dari ketentuan tabel di atas juga dapat dilihat, bahwa secara garis besar seorang saksi itu terkadang pernah mendapatkan pertanyaan yang menjerat terhadap pribadi mereka baik itu dari penasehat hukum, jaksa dan juga hakim itu sendiri.

Edwin, SH, menjelaskan posisi saksi didalam persidangan dalam memberikan keterangannya masih mendapatkan tekanan dari pihak yang bersangkutan, mengakibatkan saksi merasa terancam mentalnya dikarenakan pertanyaan yang menekan dirinya. Dengan tidak ada kebebasan yang diberikan dengan maksimal terhadap saksi untuk dapat memberikan keterangannya di persidangan tersebut⁸⁸.

Juga saksi terkadang tidak adanya yang menjamin secara pasti untuk diberikannya perlindungan terhadapnya, sehingga saksi tidak merasa dirinya lagi tertekan/terintimidasi dari hal-hal yang mengancam jiwannya. Dengan demikian nantinya dapat pula diketahui saksi itu memiliki tujuan dalam memberikan keterangan di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dari penjelasan di atas dapat di kemukakan jawaban responden yang memiliki tujuan dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel XI

Tujuan Saksi Dalam Memberikan Keterangan Di Persidangan

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Untuk menjelaskan dengan sesungguhnya	20	66,66 %
2	Untuk menjawab pertanyaan	7	23,33 %
3	Tidak tahu sama sekali	3	10,00 %
Jumlah		30	100 %

⁸⁸Edwin, (Advokat), wawancara, Jalan Suka Karya Panam, tanggal 14 Desember 2010

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebanyak 20 orang atau 66,66% responden menjawab dalam memberikan keterangannya bertujuan untuk menjelaskan dengan sesungguhnya, dan 7 orang atau 23,33% responden bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan apa yang ia lihat, dengar dan/atau alami sendiri, sedangkan sisanya responden menjawab tidak tahu sama sekali berjumlah 3 orang atau dengan persentase 10,00% dari data yang diperoleh.

Pemeriksaan saksi di pengadilan merupakan tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dalam memberikan keterangan. Namun keadaan sedemikian seharusnya memperoleh perlindungan yang efektif dari para pihak yang berwenang sewaktu pemeriksaan berjalan, agar saksi dapat memberikan keterangan itu dengan leluasa dan bebas dari tindakan dan ancaman yang menyiksa dirinya. Maka saksi yang memberikan keterangan sewaktu pemeriksaan merupakan faktor yang harus diberikan perlindungan agar terhindar dari tekanan dan pertanyaan yang menjerat terhadap dirinya.

Berikut akan dikemukakan jawaban responden yang mendapatkan perlindungan sewaktu pemeriksaan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel XII

Perlindungan Saksi Sewaktu Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Mendapat	19	63,33 %
2	Kadang-kadang	6	20,00 %
3	Tidak sama sekali	5	16,66 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebanyak 19 orang atau 63,33% responden menjawab mendapat berupa perlindungan sewaktu pemeriksaan di persidangan, dan 6 orang atau 20,00% menjawab kadang-kadang pernah mendapatkan perlindungan dari Aparat Penegak Hukum, sedangkan sisanya berjumlah 5 orang atau dengan persentase 16,66% menyatakan tidak pernah memperoleh perlindungan dari siapapun ketika proses pemeriksaan dilaksanakan.

Perlindungan yang diberikan terhadap saksi di dalam proses pemeriksaan di pengadilan merupakan hak bagi saksi untuk mendapatkannya, akan tetapi dari tabel di atas menjelaskan, bahwa tidak semua saksi itu tetap dalam posisi dilindungi dan mendapatkan keamanan bagi dirinya sewaktu diperiksa, dan inilah yang mengakibatkan rasa ketakutan seorang saksi terhadap dirinya, dikarenakan tidak adanya penjagaan yang secara efektif diberikan kepadanya baik itu sebelum maupun juga sesudah ia diperiksa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut.

Maka setelah saksi selesai diperiksa di pengadilan, apakah saksi itu juga tetap masih berada di dalam ruang sidang atau saksi disuruh pulang oleh Majelis Hakim tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang ada di bawah ini.

Tabel XIII

Posisi Saksi Setelah Selesai Dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan

No	Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Keluar	11	36,66 %
2	Di dalam	14	46,66 %
3	Tidak tahu	5	16,66 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel di atas, bahwa responden menjawab 11 orang atau 36,66% saksi setelah selesai memberikan keterangan disuruh kembali pulang atau keluar dari persidangan, dan 14 orang atau 46,66% responden menjawab tidak ada disuruh pulang atau keluar untuk meninggalkan ruang sidang atau dengan kata lain saksi juga masih tetap diposisikan berada di dalam persidangan, sedangkan sisanya berjumlah 5 orang atau dengan persentase 16,66% menjawab tidak tahu apakah mereka itu disuruh pulang/keluar atau tetap berada di dalam ruang sidang.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa saksi yang tidak ada disuruh pulang oleh hakim ketua atau meninggalkan ruang sidang itu lebih banyak dibandingkan dengan saksi yang meninggalkan ruang sidang.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Saksi Kejahatan

Perlindungan hukum bagi saksi saat ini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia, dimana satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan. Perlindungan terhadap saksi kejahatan harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan.

Mengenai perlindungan hukum terhadap saksi kejahatan tersebut sebenarnya sudah secara jelas diberikan kepada saksi yang akan dimintakan keterangannya dimuka pengadilan. Sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan pada bagian menimbang dan juga pada pasal 2 undang-undang tersebut yang berbunyi: *“Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”*.

Sehingga dapat dilihat, bahwa pelaksanaan dan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 terhadap perlindungan saksi kejahatan yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih bisa tidak tercapai dan juga di kategorikan pakum ataupun tidak dapat terlaksanakan. Padahal didalam pasal 1 pada bab 1 butir keenam (6) menjelaskan yaitu *Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuaidengan ketentuan undang-undang ini*. Dan juga adanya Jaminan Perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan tetapi tidak juga dapat di implementasikan oleh para aparat kepolisian maupun para pengak hukum, sesuai pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga memberikan jaminan kepada saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa kesaksiannya tersebut tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun gugatan secara perdata, ini merupakan perlindungan hak asasi seorang saksi yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terjadi kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut.

Demikian pula berlaku bagi warga masyarakat yang memiliki i'tikad baik untuk melaporkan sesuatu tindak pidana, juga dilindungi oleh pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut⁸⁹. Maka pada perakteknya dilapangan

⁸⁹Rocky Marbun, *Op.cit.*, h. 89

terlihat bahwa pelaksanaan undang-undang ini tidak dijalankan secara optimal oleh para aparat penegak hukum, sehingga saksi dan/atau korban kejahatan merasa dirinya takut untuk memberikan keterangan pada tahap proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sementara dalam pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba dan pasal 54 ayat (3) undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika menentukan pula perlindungan dan jaminan keamanan, tetapi tidak dijelaskan bentuk dan prosedurnya. Masih banyak memang ketentuan perlindungan bagi saksi yang tersebar di berbagai undang-undang.

Dalam peraturan pemerintah (PP) pun perlindungan bagi saksi memang telah diatur, yakni dalam pasal 9 PP nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Di dalam ketentuan itu dikatakan, perlindungan hukum diperoleh dengan memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan kepada kepolisian republik indonesia atau instansi yang berwenang.

Akan tetapi, dari peraturan pemerintah itu masih belum jelas apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Dalam bentuk apa perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan itu belum dapat disimpulkan sebagai perlindungan fisik. Artinya, semua ketentuan itu tidak memberikannya secara tegas dan lengkap. Ketentuan-ketentuan tersebut nampak menunjukkan kelemahan posisi

saksi. Sementara kewajiban seorang saksi jauh lebih menonjol dibandingkan dengan hak-hak mereka diatas. Kenyataan demikian membuat tidak dapatnya perlindungan hukum diberikan kepada saksi secara maksimal.

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi. Sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nyatanya selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai.

Pada umumnya saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam proses pemeriksaan memang sangat merasa takut untuk memberikan keterangannya di dalam persidangan, melihat dari banyaknya saksi yang menyatakan dirinya takut untuk dijadikan saksi kejahatan tersebut, dikarnakan apabila saksi yang dipanggil tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka ia dapat dihukum oleh pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan dengan sisa-sisa itu, dan pula mengganti segala kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak disebabkan oleh ketidak hadiran itu. kemudian ketua dapat memerintahkan

saksi yang tidak hadir itu oleh polisi untuk menghadap kepengadilan untuk memenuhi kewajibannya terdapat dalam pasal 167 RBG/141 HIR (1) dan (2). Jika saksi yang tidak hadir itu dapat membuktikan bahwa ketidakhadirannya itu dengan suatu sebab yang sah, maka pengadilan menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya (pasal 168 RBG/142 HIR)⁹⁰.

Setelah saksi didudukkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan identitas saksi yang telah dilampirkan di dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana yang telah disusun oleh panitera pengadilan. Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang (pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 164 KUHAP menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut umum atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.

⁹⁰Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Cet ke-2, h. 104

(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya⁹¹.

Sesuai yang dilakukan penelitian dengan melakukan opservasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana terkadang saksi yang dimintakan penjelasannya oleh Hakim di dalam persidangan pernah mendapatkan pertanyaan yang menyimpang dan menjerat dari Penasehat Hukum, Jaksa sewaktu selesai memberikan keterangan, mengakibatkan saksi merasa terintimidasi/ tertekkan dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya⁹².

Sedangkan didalam pasal 166 KUHAP juga menjelaskan, bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi.

Oleh karena itu, arti kebebasan saksi memberi keterangan disidang pengadilan, bukan dalam arti memberi kebebasan untuk berbohong atau meniadakan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Arti bebas yakni memberi keterangan dipersidangan, ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi, yakni dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan:

⁹¹ Solehuddin, *op.cit.*, h. 188

⁹²Pengadilan Negeri Pekanbaru, *observasi*, (diruang sidang), tanggal 23 Nopember 2010

1. Tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun.
2. Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan tarap kemampuan kecerdasannya, jangan dipaksa, saksi menjawab atau menerangkan suatu yang berada diluar jangkauan tarap kecerdasannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan kepada saksi atau ahli harus dengan kalimat pertanyaan yang disesuaikan dengan tarap pendidikan dan kecerdasannya.
3. Dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh Hakim atau Penuntut Umum dianggap seolah-olah pernah dinyatakan saksi. Pernyataan yang menjerat seperti ini, melanggar kebebasan saksi memberikan keterangan⁹³.

Maka dalam pasal 167 KUHAP dapat pula menjelaskan sebagai berikut:

- (1). Setelah saksi memberikan keterangan, dia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum menagajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Dengan demikian proses perlindungan terhadap saksi kejahatan dalam suatu pemeriksaan di setiap peradilan dapat diharapkan untuk terlaksanaan sistem

⁹³M.Yahya Harahap, *op.,cit*, h.184-185

peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan oleh Negara republik Indonesia. Agar dapat pencapaian rasa keadilan dan perlindungan bagi saksi kejahatan dan jauh dari tekanan serta rasa takut untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan-pengadilan yang berada di Negara Indonesia dan terutama di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru dikategorikan masih minim. Hal ini dapat dibuktikan minimnya perlindungan yang diberikan terhadap saksi itu sendiri, mengingat saksi masih merasa takut ketika hendak memberikan kesaksiaanya di pengadilan tersebut, disamping itu perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada saksi tidak begitu optimal yang mengakibatkan saksi sukar dalam memberikan kesaksian di pengadilan negeri pekanbaru dan begitu juga didalam pasal 167 RBG/141 HIR (1) dan (2), Pasal 224 dan 522 KUHP juga menegaskan apabila saksi itu tidak berkenan untuk dihadirkan kepersidangan, maka secara hukum saksi dapat dikenakan sanksi pidana, mengakibatkan saksi sering takut dan tidak berkenan untuk dijadikan saksi.
2. Adapun faktor yang menyebabkan perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu dimana para saksi yang menyatakan dirinya takut untuk memberikan keterangan pada proses pemeriksaan di persidangan, adanya mendapatkan tekanan dan ancaman yang di peroleh saksi kejahatan disamping itu saksi terkadang pernah mendapatkan pertanyaan yang menjerat terhadap pribadi mereka baik itu dari penasehat

hukum, jaksa dan juga hakim itu sendiri, sehingga menyebabkan begitu susahnyanya memperoleh perlindungan yang secara efektif terhadap saksi kejahatan dari aparat penegak hukum dan juga tidak adanya lembaga yang menjamin untuk diberikannya perlindungan terhadap saksi. Melihat LPSK juga belum ada di setiap daerah hanya saja masih berada di ibu kota Negara. Mengakibatkan Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi kejahatan dan korban sangat minim padahal itu seharusnya lebih diutamakan untuk menjaga hak dan jiwanya, sehingga dengan pentingnya perlindungan terhadap saksi kejahatan dan korban pada setiap proses peradilan.

3. Perlindungan terhadap saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan merupakan unsur yang harus diberikan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan di setiap pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi kejahatan dalam memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan yang begitu belum secara optimal untuk di realisasikan bagi saksi kejahatan yang berhak memperoleh perlindungan secara efektif dari lembaga-lembaga yang berwenang sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

B. Saran-saran

1. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang

tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.

2. Dengan minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun mandat itu harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
3. Khusus mengenai perlindungan saksi, hendaknya dijadikan satu dalam sebuah undang-undang yang mencakup semua perlindungan hukum bagi semua orang dalam satu sistem hukum yang namanya adalah hukum perlindungan masyarakat, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat tentang apa-apa yang dilindungi oleh hukum yang kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet ke-1
- Arif, Nawawi, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: PT.Rajawali Pres, 2007), Cet ke-2
- Djamil, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),Cet Ke-2
- Didik, M. Arief, Mansur, dan, Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet ke-1
- Direktorat Jendral Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, *Dokumentasi Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri*, (Jakarta: 1922), Cet ke-5
- Guza, Afnil, *Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. ke-1
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-11
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996), Cet ke-1
- Makaraao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Cet. ke-2
- Marbun, Rocky, *Cerdi dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta Selatan: CV. Visimedia 2010), Cet ke-1
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Cet. ke-1
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), Cet ke-3
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-5
- Rasyid, A. dan, Roihan, H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-10

- Redaksi, Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (UU RI No.13 Tahun 2006), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet ke-1
- Rozali, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Cet ke-1
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumi, 1992), Cet. Ke-1
- S.M, Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), Cet ke-1
- Solehuddin, (Penghimpun), *Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Acara Pidana, dan Acara Perdata* (KUHP, KUHP, dan KUHPrt), (Jakarta: CV. Visimedia, 2008), Cet ke-1
- Subekti. dan, Soedibia, R. Tjitro, *Kamus Hukum* , (Jakarta: Pustaka Pradya Paramita, 1976), Cet ke- 2
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-1
- Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta Selatan: CV. Visimedia, 2009), Cet. ke-1
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet ke-2
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet ke-1
- W.A.Bonger ,Mr., *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), Cet ke-7
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, Dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004), Cet ke-2
- Yudowidagdo, Hendrastanto, Dkk, *Kapita Selekt Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), Cet ke-1

Yuswandi, Ali, *penuntutan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), Cet ke-1

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), Cet ke-2

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Dokumentasi Penelitian Skripsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- Lampiran II. Quesioner (Angket) Penelitian Skripsi
- Lampiran III. Daftar Wawancara Penelitian Skripsi
- Lampiran IV. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari Kantor Gubernur Riau
- Lampiran V. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari KESBANG POL Kota Pekanbaru
- Lampiran VI. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru
- Lampiran VII. Surat Keterangan Lulus Komprendsif Dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- Lampiran VIII. Surat Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran IX. Surat Acc Perbaikan Skripsi Dari Penguji I, II, dan Ketua Sidang, Sekretaris Ujian Skripsi

DAFTAR TABEL

Tabel I. Saksi Yang Merasa Takut Ketika Dihadirkan Di Persidangan Untuk Memberikan Kesaksian.....	61
Tabel II. Saksi Yang Pernah Mendapatkan Tekanan/Intimidasi Dari Pihak Manapun Sebelum Memberikan Kesaksian.....	64
Tabel III. Keadaan Saksi Sesudah Memberikan Keterangan Di Persidangan.....	66
Tabel IV. Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dari Aparat Penegak Hukum.....	67
Tabel V. Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dari Aparat Penegak Hukum Setelah Memberika Kesaksian.....	68
Tabel VI. Keadaan Saksi Ketika Memperoleh Perlindungan Dari Aparat Penegak Hukum.....	71
Tabel VII. Perasaan Saksi Kejahatan Sewaktu Proses Pemeriksaan.....	73
Tabel VIII. Saksi Membubuhkan Tanda Tangannya Sebelum Atau Sesudah Diperiksa.....	74
Tabel IX. Saksi Kejahatan Ditanya Oleh Hakim, Jaksa, Dan Penasehat Hukum.....	76
Tabel X. Saksi Mendapatkan Pertanyaan Yang Menjerat Dari Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum Sewaktu Diperiksa.....	78
Tabel XI. Tujuan Saksi Dalam Memberikan Keterangan Di Persidangan.....	79
Tabel XII. Perlindungan Saksi Sewaktu Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	81
Tabel XIII. Setelah Selesai dalam peroses pemeriksaan Saksi di persidangan.....	82

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DITINJAU
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

PETUNJUK PENGISIAN

1. Questioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Bapak / Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan Bapak / Ibu.
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan a, b, c, d atau e yang sesuai dengan keinginan Bapak / Ibu.
3. Terima kasih banyak kepada Bapak / Ibu yang telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan Bapak / Ibu semuanya. *Amin...*

1. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
Jenis Kelamin : (L / P)
Alamat :
Perkara Pidana :
Hari/Tgl/Bulan/Tahun :

2. Berapa usia Bapak / Ibu sekarang ?

- a. 17 Tahun
- b. 25 Tahun
- c. 35 Tahun
- d. 45 Tahun
- e. Diatas 50 Tahun

3. Apakah Bapak / Ibu sudah menikah ?

- a. Sudah
- b. Belum

II. PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN

1. Apakah Bapak / Ibu pernah menjadi saksi kejahatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-Kadang
2. Apakah Bapak / Ibu tahu, ketika ingin dihadirkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Kurang Tahu
3. Apakah Bapak / Ibu merasa takut ketika dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksiannya ?
 - a. Takut
 - b. Kurang Takut
 - c. Tidak Takut
4. Apakah Bapak / Ibu pernah mendapatkan tekanan / intimidasi dari pihak manapun sebelum memberikan kesaksian ?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-Kadang
 - c. Tidak Pernah
5. Dan bagaimana pula sesudahnya. Apakah pernah mendapatkannya ?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-Kadang
 - c. Tidak Pernah
6. Apakah Bapak / Ibu pernah merasa dilindungi dari aparat penegak hukum ?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-Kadang
 - c. Tidak Pernah
7. Apakah Bapak / Ibu tetap masih dalam posisi dilindungi oleh aparat penegak hukum setelah memberikan kesaksiannya ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- c. Tidak Tahu
- 8. Apakah Bapak / Ibu merasa senang, ketika memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum ?
 - a. Senang
 - b. Cukup Senang
 - c. Amat Senang

III. PROSES SAKSI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

- 1. Apakah Bapak / Ibu merasa takut ingin dijadikan seorang saksi sewaktu pemeriksaan ?
 - a. Takut
 - b. Kurang Takut
 - c. Tidak Takut
- 2. Apakah ada Bapak / Ibu membubuhkan tanda tangan sebelum ataupun sesudah diperiksa ?
 - a. Ada
 - b. Tidak Tahu
 - c. Tidak Ada
- 3. Apakah Bapak / Ibu ada ditanya oleh hakim, jaksa, ataupun pengacara sewaktu diperiksa ?
 - a. Sering
 - b. Ada
 - c. Kadang-Kadang
- 4. Apakah Bapak / Ibu pernah mendapatkan pertanyaan yang menjerat dari Hakim, Jaksa, Pengacara sewaktu di periksa ?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-Kadang
 - c. Tidak Pernah

5. Apakah tujuan bapak / Ibu untuk memberikan keterangan sewaktu pemeriksaan di sidang pengadilan ?
 - a. Untuk menjelaskan dengan sesungguhnya
 - b. Untuk menjawab pertanyaan
 - c. Tidak tahu sama sekali
6. Apakah Bapak / Ibu juga mendapat perlindungan sewaktu pemeriksaan di Pengadilan Negeri dari aparat penegak hukum ?
 - a. Mendapat
 - b. Kadang-Kadang
 - c. Tidak sama sekali
7. Apakah setelah selesai diperiksa Bapak / Ibu langsung disuruh pulang oleh Majelis Hakim ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu